

DIAM atau MELAWAN
(Misi Paus Leo XIV Terhadap Kapitalisme Liberal Tanpa
Kendali)

Alexander Jebadu

Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero-Flores

Paus baru terpilih biasanya memilih nama baru. Pemilihan nama baru tentu bukan tanpa maksud. Konteks dan ceritanya sangat ranjang. Namun intinya, satu.

Sebagaimana pada umumnya diyakini, nama mencerminkan jati diri dan misi utama yang harus diperjuangkan dalam hidup seseorang. Dalam ungkapan Romawi kuno, hal ini disebut "*nomen est omen*", secara harfiah berarti, nama adalah makna. Itu artinya nama adalah sebuah tanda yang menunjukkan siapa and apa yang diperjuangkan oleh penyandang nama tersebut.

Ke arah sanalah tujuan tulisan ini. Semua sudah mengetahui bahwa Paus baru Gereja Katolik yang terpilih 8 Mei 2025 itu, yang sekaligus merupakan Kepala Negara Vatikan, memilih nama baru Paus Leo XIV. Adalah Paus Leo XIII sebagai paus terakhir yang menggunakan nama Leo. Siapa dan apakah Leo XIII ini tentu menjadi signal tentang arah misi pelayanan dari paus baru ini yang menurut iman orang Kristen Katolik adalah wakil Allah (*vicarius Christi*) di dunia.

Signal ini tentu akan memberikan beberapa penekanan pada tugas pelayanan seorang Paus. Secara umum, paus terpilih atas nama Allah dan bersama semua orang yang berkehendak baik, memperjuangkan sebuah dunia yang penuh kasih dan adil, setia kawan dan kekeluargaan tinggi semua umat manusia. Ini menjadi dasar bagi terciptanya sebuah dunia yang damai.

Pada saat bersamaan, atas nama Allah dan bersama semua orang yang berkehendak baik, paus ini juga bekerja membebaskan semua orang yang menderita miskin dan mengutuk akar penyebabnya dalam struktur

sosial ekonomi yang tidak adil yakni kapitalisme liberal alias ekonomi pasar bebas yang lahir pada abad XVIII.

Pada titik inilah, akan terlihat sumbangsing Leo XIII. Dalam sejarah dunia, perjuangan misi Gereja untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan ekonomi liberal, telah dimulai pertama kali oleh Paus Leo XIII dan Paus Leo XIV mau meneruskan misi perjuangan yang sama.

Ensiklik *Rerum Novarum*

Paus Leo XIII menjadi paus pada akhir abad XIX hingga awal abad XX (1878-1903). Pada zaman kepausannya, banyak warga masyarakat Eropa dan seluruh dunia jatuh terpenggang kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ini terjadi akibat sepak terjang sistem ekonomi liberal yang lahir bersamaan dengan revolusi industri dan bentuk usaha ekonomi yang disebut korporasi dari tahun 1750-1850.

Sistem ekonomi liberal ini, seperti telah dimaklumi, pada prinsipnya menolak kepemilikan bersama sumber-sumber daya ekonomi. Sumber daya alam planet bumi dimengerti sebagai kekayaan tak terbatas tanpa tuan yang terbuka untuk dieksploitasi oleh siapa saja dan setiap individu bebas bersaing untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi di mana saja di seluruh dunia.

Bagi kita, tidak sulit sebenarnya untuk memahami sistem ini. Kalau menengok sejarah negeri kita, persis sistem ekonomi liberal inilah yang terjadi di Kepulauan Nusantara selama berabad-abad melalui VOC (*Vereenigde Indische Compagnie* = Perserikatan Dagang Hindia Timur).

Sejak VOC ditutup karena bangkrut pada tahun 1799, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh Kepulauan Nusantara adalah perusahaan-perusahaan swasta rakyat Kerajaan Belanda. Pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia hanya hadir untuk mengamankan perusahaan-perusahaan milik swasta Belanda.

Sepak terjang ekonomi kapitalis liberal, yang dieksekusi oleh korporasi swasta ini, sejak awal kelahirannya pada akhir abad XVIII (1776) telah menciptakan ketidakadilan sosial ekonomi secara masif bagi mayoritas warga masyarakat Eropa dan warga bangsa-bangsa jajahan mereka di Asia dan Afrika. Kaum buruh menjadi sangat miskin. Kehidupan mereka, seperti dilukiskan Karl Max dan Frederic Engels dalam *The Communist Manifesto* (1848), hampir tak berbeda dengan hewan piaraan di dalam kandang. Rakyat ke Kepulauan Nusantara dipaksa penjajah Belanda untuk menanam tanaman perdagangan secara paksa untuk memenuhi kebutuhan dagang mereka yang disebut *Cultuurstelsel*.

Terhadap ketidakadilan sistem ini, dunia memberikan reaksi. Mewakili para pemikir saat itu, Karl Max dari Jerman dan Frederic Engels dari Inggris menentangnya dengan menerbitkan *The Communist Manifesto* tahun 1848 (72 tahun setelah penerbitan *The Wealth of Nations* dari Adam Smith sebagai sumber suci bagi ekonomi kapitalis liberal yang terbit pada tahun 1776) dan Karl Max seorang diri dengan menerbitkan *Das Capital* tahun 1867 (91 tahun setelah penerbitan *The Wealth of Nations* tahun 1776). Dalam buku ini, Karl Max bahkan merancang sistem ekonomi sosialis/komunis yang pada intinya menghapus hak-hak individu dari kebebasan liar untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi yang diusung Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*.

Reaksi dan tanggapan Gereja juga tidak kalah daya terjangnya. Untuk pertama kalinya Gereja bersuara sangat keras. Dari sekian banyak ensiklik yang sudah diterbitkan para paus selama sekitar 15 abad sebelumnya, melalui Ensiklik *Rerum Novarum* (1891), 115 tahun setelah penerbitan *The Wealth of Nations* (1776) dan 44 tahun setelah penerbitan *The Communist Manifesto* (1848) dan 24 tahun setelah penerbitan *Das Capital* (1867), untuk pertama kalinya dalam sejarah kekristenan, Gereja Katolik melalui Paus Leo XIII berbicara kepada dunia untuk menanggapi, memberikan kritikan kenabian dan mengusulkan jalan keluar dari masalah kekerasan dan ketidakadilan

sosial ekonomi yang menimpa warga masyarakat dunia yang ditimbulkan oleh dua sistem ekonomi yang saling bertentangan ini.

Paus Leo XIII menyuarakan kritiknya dalam Ensiklik *Rerum Novarum* yang secara hurufiah artinya “Hal-Hal Baru”. Untuk Gereja Katolik pada masa itu, hal-hal baru dimaksud ialah kekerasan dan ketidakadilan sosial ekonomi.

Melalui *Rerum Novarum*, Paus Leo XIII atas nama Allah mendesak untuk menegakkan 11 hal sebagai berikut. Pertama, pekerjaan manusia mesti dihargai dan dihormati dengan upah yang adil. Kedua, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja, memastikan kondisi kerja yang adil, dan mempromosikan keadilan sosial. Ketiga, negara harus mengintervensi usaha ekonomi untuk menjaga kebaikan bersama. Keempat, hak milik pribadi diakui tetapi penggunaannya mesti disertai dengan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Kelima, pemilik barang memiliki kewajiban untuk menggunakan harta benda mereka demi keuntungan orang lain dan kebaikan bersama.

Keenam, para pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja, berunding bersama dan menerima upah yang adil. Ketujuh, pengusaha harus menyediakan kondisi kerja yang aman dan memperlakukan pekerja secara bermartabat. Kedelapan, solidaritas antarkelas sosial sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil. Kesembilan, keluarga merupakan fondasi masyarakat dan kestabilannya sangat penting bagi kestabilan masyarakat. Kesepuluh, pendidikan sangat penting bagi pengembangan manusia dan etika sangat penting dalam mengambil setiap keputusan bisnis dan ekonomi. Kesebelas, keadilan sosial, kebaikan bersama dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi anggota masyarakat yang paling rentan sangat penting dan menjadi prasyarat bagi perdamaian.

Kapitalisme Liberal Tanpa Kendali

Dampak yang terjadi ialah sebaliknya. Sistem ekonomi liberal ini tetap berjalan seperti biasa. Akibatnya, selain semakin memiskinkan warga miskin, ketidakadilan dalam mengeksploitasi sumber daya alam planet bumi di antara negara-negara pengusung kapitalisme liberal sendiri ternyata akhirnya memicu lahirkan Perang Dunia I dan II (PD I & II).

Bukti kasatmata bahwa PD I & II disebabkan oleh kekerasan dan ketidakadilan dari sistem ekonomi liberal adalah bahwa perang ini harus diakhiri dengan menata kembali ekonomi dunia di antara negara sekutu PD II melalui Konferensi tiga Minggu 1-22 Juli 1944 di Bretton Woods Amerika Serikat. Konferensi ini menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang disebut Tata Ekonomi Dunia Baru (*The New World Economic Order*) yang ditandai dengan didirikannya Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO.

Disepakati bersama dalam konferensi itu bahwa kapitalisme liberal klasik Adam Smith harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah kapitalisme yang lebih lunak yang lazim disebut kapitalisme nasional (*state / national capitalism*) atau kapitalisme liberal terkendali (*regulated liberal capitalism*). Tujuan tata ekonomi dunia baru ini tak main-main, bahkan sangat suci, yaitu menciptakan ekonomi dunia seadil-adilnya supaya tidak terjadi lagi perang besar di planet bumi seperti yang pernah terjadi yakni PD I & II.

Akan tetapi tak lama setelah PD II berakhir, negara-negara pengusung kapitalisme liberal Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat mengelompokkan diri menjadi apa yang disebut Blok Barat (*Western Block*). Grup ini berbenturan kepentingan dengan kelompok negara Eropa Timur yang mengusung sistem sosialis-komunis yang kemudian menjadi Blok Timur (*Eastern Block*) di bawah pimpinan Uni Soviet.

Benturan antara kedua kelompok pengusung dua sistem ekonomi yang bertentangan ini menciptakan ketegangan luar biasa yang kemudian disebut Perang Dingin (*Cold War*) dari tahun 1946 hingga keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Keruntuhan rezim pengusung ekonomi

komunis tahun 1989, yang ditandai reformasi GATT menjadi WTO pada tahun 1995, akhirnya membuat sistem ekonomi kapitalis liberal leluasa beroperasi tanpa ekonomi tandingannya. Ia diibaratkan sebagai seorang petinju yang masuk ring tanpa lawan tanding akhirnya keluar ring dan meninju siapa saja yang ia jumpai di luar ring. Ia menyerang semakin gila sehingga disebut *wild capitalism* atau *jungle capitalism* (ekonomi dengan gunakan hukum rimba) atau *uncontrolled free market economy* (ekonomi pasar bebas tanpa kendali).

Pengimplementasiannya pun ditempuh dengan jalan rahasia. Secara diam-diam dan tanpa diketahui banyak orang. Juga tanpa melalui kesepakatan bersama melalui sebuah konferensi ekonomi dunia seperti yang terjadi di Breton Woods pada tahun 1944.

Coba bayangkan. Sejak awal tahun 1980-an, resep-resep ekonomi liberal klasik Adam Smith, yang dikubur mati pada tahun 1944, diimplementasikan lagi secara diam-diam dan dipaksa oleh negara-negara kreditor untuk diterapkan di negara-negara berkembang yang sudah terlebih dahulu dijerat dengan utang luar negeri pada Bank Dunia dan IMF sejak takhir tahun 1960-an.

Itulah sebabnya ia disebut ekonomi neoliberal karena ekonomi pasar bebas tanpa kendali ini merupakan re-inkarnasi dari ekonomi liberal klasik Adam Smith yang dikubur mati pada tahun 1944. Untuk mengamankan pengeksploitasinya secara bebas tanpa batas ini, pengusungnya, yaitu orang kaya, mengamankan ekonomi ini dengan dengan berlomba-lomba membuat dan menumpukkan senjata termasuk senjata nuklir. Senjata ini jelas dipakai untuk mengamankan ekonomi pasar bebas yang menguntungkan mereka.

Buah Pahit

Tak terhindarkan lagi, buah pahit sepak terjang system ini menyebar dengan sangat massif. Kekerasan merajalela silih berganti tanpa akhir. Perang Teluk (1991), perang lawan terorisme (sejak

2001), konflik suku di Afrika, konflik Sampit, konflik Poso dan Papua, semuanya lahir dari rahim dunia yang mengusung ekonomi pasar bebas tanpa kendali (neoliberalisme). Masalah krisis ekologi, perubahan iklim (*climate change*), pemanasan global (*global warming*), bencana alam, perdagangan orang (*human trafficking*), korupsi publik, pertambangan ilegal, industri geothermal yang dipaksakan, kecurangan pilpres dan pilkada di Indonesia dengan menginjak konstitusi, semuanya merupakan buah pahit dari sistem ekonomi yang menganut hukum rimba ini yaitu ekonomi pasar bebas tanpa kendali.

Di dalam Gereja Katolik, semua masalah ini telah menjadi keprihatian Gereja sejak Paus Leo XIII hingga Paus Leo XIV ini. Dalam Ensiklik *Evangelii Gaudium* (2013), misalnya, Paus Fransiskus menyebut kapitalisme sebagai tirani tanpa batas dan berhala uang. Di dalam Ensiklik *Laudato si* (2015) paus mengeritik budaya konsumerisme (*throw away mentality*) sebagai buah ekonomi kapitalis yang mengusung pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Dunia ini semakin maju, kata Paus Fransiskus, tapi banyak sekali yang masih miskin karena dunia dikibuli oleh sebuah teori ekonomi (*trickle-down effect economic theory*) yang kebenarannya tidak pernah didukung fakta.

Beberapa negara sudah mencapai kemajuan yang berlebih (*over-developed*), sementara yang lain malah mundur ke belakang (*backward*). Baik secara global, regional maupun nasional, segelintir orang kaya semakin kaya dan mayoritas orang miskin semakin miskin. Menurut Eric Tossain dalam buku *Debts, IMF dan World Bank* (2010), 80% dari 8 miliar penduduk dunia mengkonsumsi hanya 20% dari kue kekayaan alam planet bumi. Sementara 80% kue ekonomi ini dikonsumsi oleh 20% dari 8 miliar penduduk dunia yang kaya.

Kiprah Paus Leo XIV

Di Tengah-tengah sistem liberal tanpa kendali seperti inilah Paus Leo XIV memulai karya kepausannya. Ketidakadilan semakin melebar dan kemiskinan semakin merebak.

Sambil menantikan penuh harap kiprah-kiprah Paus Leo XIV dan tanpa bermaksud untuk mendahuluinya, di sini, saya hanya ingin mengutip Felix Wilfred, seorang teolog India (1996), yang terhadap orang miskin sebagai korban kapitalisme liberal, mengatakan begini: “Jika kita ingin supaya misi keperpihakan Gereja terhadap orang miskin (*option for the poor*) dan terpinggirkan (*the marginalized*) bisa efektif, maka mau tidak mau hal itu mesti diperjuangkan dengan berdiri melawan sistem ekonomi yang berlaku saat ini yakni ekonomi kapitalis liberal. Kita tidak bisa membela orang miskin tapi pada saat yang sama kita mendukung sistem ekonomi yang memangsa orang miskin. Bela orang miskin berarti harus melawan sistem ekonomi yang memikiskan mereka.”

Dengan memilih nama Leo XIV, tampak jelas apa yang menjadi keprihatinan misi pelayanan paus baru ini. Bersama semua orang yang berkehendak baik dan terutama bersama Allah sendiri, dia mau memperjuangkan sebuah dunia yang damai di atas wadah praktik kasih, keadilan dan persaudaraan semua umat manusia apapun agama, suku dan bangsanya, serta memerangi semua struktur sosial ekonomi yang merusak kasih, keadilan dan persaudaraan. Demi kebaikan bersama semua umat manusia, atas nama Allah, dia harus dia atau dan melawannya! @ @ @